

# "MUSLIM MODERAT" DALAM KONTEKS SOSIAL POLITIK DI INDONESIA

Oleh : Hairul Puadi  
(STAI Al-Qolam Gondanglegi Malang)

*"Moderate Muslims" is a problematic, in the sense that it is too wide for the debate and the plurality of meanings. Everything depends entirely on the perspective, mindset, or even a subjective interests of the maker of meaning itself. This paper describes the debate over the meaning, sociological reality and the role of "moderate Muslims" in Indonesia. With a sociological explanation, this paper concluded that in the context of socio-political constellation today, the meaning of the term "moderate Muslim" can actually be identified easily. The term refers to the majority of Muslims who live and move to and in the midst of the society, seeking a change from the ground, and reject religious extremism, violence, and terrorism. The existence of a moderate wing of Islamic organizations such as NU and Muhammadiyah is a guarantee for the establishment of democracy optimism in Indonesia in the midst of "the storm" of radical Islamic groups today.*

**Keywords:** Moderate Muslims, Radicalism and Democracy.

## PENDAHULUAN

*Minimally, I would argue that moderate Muslims are those who live and work within society, seek change from below, and reject religious extremism, illegitimate violence, and terrorism. And as in other faiths, in Islam such moderates constitute the majority of the mainstream.*<sup>1</sup>

Kutipan di atas merupakan penjelasan John L. Esposito (2011) terhadap salah satu dari sekian banyak pertanyaan yang beredar di kalangan rakyat Amerika Serikat tentang Islam. Ragam pertanyaan itu semakin berkecamuk pasca tragedi 11 September 2001, ketika rakyat Amerika Serikat ketika itu dilanda oleh kecemasan yang luar biasa, seraya bertanya-tanya: Mengapa Islam begitu bengis? Apakah al-Qur'an membenarkan terorisme dan tindakan bom bunuh diri? Apakah Islam bisa cocok dengan modernitas? Mengapa umat Islam sampai hati menganiaya umat Kristen dan Yahudi?<sup>2</sup> Ragam pertanyaan tersebut tentu bernada negatif terhadap Islam, menggambarkan betapa posisi Islam dan komunitas Muslim saat itu—dan relatif masih berlangsung hingga saat ini—begitu tersudut di mata dunia Internasional.<sup>3</sup>

1 John. L. Esposito, *What Everyone Needs to Know about Islam: Answers to Frequently Asked Questions, from One of America's Leading Experts*, edisi II (Oxford: Oxford University Press, Inc., 2011), halaman 147-148. Edisi I buku ini terbit pada tahun 2002.

2 *Ibid.*, halaman xiii.

3 Dalam bukunya yang lain, Esposito menggambarkan tiga macam "suara" (*voices*) masyarakat Amerika pascatragedi kemanusiaan itu tentang Islam, yaitu (1) membenturkan antara Barat dan Islam—dipengaruhi oleh tesis "*the clash of civilizations*" versi Samuel Hantington, (2) mempertanyakan kompatibilitas Islam dengan modernitas dan demokrasi—dipengaruhi oleh tesis "*what went wrong?*" versi Bernard Lewis, dan (3) mendramatisasi "kebencian" dunia Islam terhadap Amerika Serikat—dipengaruhi oleh pertanyaan "*why do they hate us?*" yang sering dilontarkan oleh kalangan elit politik negeri Paman Sam itu, terutama Presiden George W. Bush. Lihat: John L.

Pada bagian awal penjelasannya, Esposito mengakui bahwa "Muslim Moderat" adalah term yang problematis, dalam arti membuka ruang yang terlalu luas bagi perdebatan dan pluralitas pemaknaan yang belum kunjung menemukan titik akhir hingga saat ini. Semuanya bergantung sepenuhnya kepada perspektif, *mind set*, atau bahkan kepentingan subyektif yang melatari pembuat makna itu sendiri. Namun, pada akhirnya, Esposito mau tidak mau harus menegaskan pemaknannya terhadap term "Muslim moderat" berdasarkan konteks dan kepentingan yang melatarbelakangi narasi dari bukunya secara keseluruhan. Konteks dan kepentingan yang dimaksud adalah (1) "kecemasan" masyarakat Barat—terutama Amerika Serikat—terhadap aksi teror pascatragedi 11 September 2001, (2) persepsi negatif mereka tentang Islam sebagai konsekuensi logis dari minimnya informasi yang mereka miliki tentang Islam itu sendiri, (3) memanasnya atmosfer politik antara dunia Barat dan dunia Islam, dan (4) kegelisahan akademik Esposito sendiri sebagai salah satu dari sekian banyak sarjana Barat yang sangat simpatik terhadap Islam.<sup>4</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwa ragam pemaknaan yang mengemuka seputar term "Muslim moderat" sama-sama memiliki argumentasi dan pijakan logika tertentu. Penentuan salah satu perspektif untuk sebuah pemaknaan,

Esposito, *the Future of Islam*, cetakan I (New York: Oxford University Press, 2010), halaman 3.

4 Zuhairi Misrawi, *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian*, cetakan I (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), halaman 61. Sikap simpatik Esposito terhadap Islam, khususnya pascatragedi 11 September 2001, nampak jelas dari keluhannya bahwa 2/3 masyarakat Amerika Serikat ternyata memiliki pemahaman yang begitu rendah tentang Islam. Apa yang mereka ketahui tentang Islam rata-rata hanya bersumber dari informasi media massa yang memang cenderung berpandangan sepihak (*one-sidedly*) terhadap Islam. Lihat: Esposito, *the Future.*, halaman 35 dan 54.

sembari mengabaikan ragam perspektif yang lain jelas mencerminkan bias-bias tertentu. Namun, apa yang dilakukan oleh Esposito jelas merupakan langkah yang tidak bisa dihindari, mengingat begitu kompleksnya ketegangan sosial-politik yang terjadi saat itu. Itulah sebabnya, pemaknaan yang dikemukakan oleh Esposito bisa menjadi titik tolak yang penting bagi kita di saat mencoba melakukan refleksi tentang Muslim moderat dalam konteks kehidupan sosial-politik di Indonesia.

### INDONESIA: NEGERINYA MUSLIM MODERAT?

Dewasa ini, terutama sejak era Reformasi, bergaung luas sebuah pernyataan bahwa Indonesia adalah “negerinya Muslim moderat” yang bisa menjadi “*role model*” bagi negara-negara Muslim lainnya. Pernyataan tersebut tentu bukan pernyataan kosong, karena disuarakan oleh sejumlah pemimpin dan tokoh kenamaan negeri ini, baik dari kalangan elit politik maupun elit agama. Sebut saja, misalnya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam salah satu tulisannya (2011),<sup>5</sup> Said Agil Siraj dalam sesi wawancara dengan wartawan NU Online pada tahun 2012 yang lalu,<sup>6</sup> Din Syamsuddin di saat berdialog dengan masyarakat dan pelajar Indonesia di London pada bulan Maret 2013 yang lalu,<sup>7</sup> dan bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di saat menyampaikan pidatonya di hadapan para peserta APEC CEO Summit

5 Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, edisi digital (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011), halaman 102.

6 <http://www.nu.or.id>, artikel “Kang Said: Islam Moderat Paling Tepat untuk Indonesia (30 Mei 2012)” (akses tanggal 19 April 2013).

7 <http://www.bisnis-kti.com>, artikel “Din Syamsuddin: Ajaran Islam Moderat Indonesia Berpotensi Jadi Role Model (24 Maret 2013)” (akses tanggal 19 April 2013).

Itulah sebabnya, walaupun terpaksa digunakan, term tersebut menurut mereka harus diposisikan

2011 di Honolulu, Hawaii pada tahun 2011 yang lalu.<sup>8</sup> Selain itu, pernyataan di atas juga berpijak di atas kenyataan sosiologis berupa tampilnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang dipandang sebagai representasi dari Muslim moderat di Indonesia. Kedua organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia itu dinilai dan dipercaya sebagai kekuatan *civil society* yang dapat meredam radikalisme Islam yang muncul bersamaan dengan keterbukaan sosial-politik era reformasi.<sup>9</sup> Pendekatan dialogis-persuasif dan cara damai yang ditempuh oleh kedua ormas tersebut, terutama dalam konteks sosial-politik saat ini, tak pelak lagi mengundang apresiasi yang baik dari dunia Internasional. Sebut saja, misalnya, Giora Eliraz, peneliti senior dari Hebrew University of Jerusalem Israel, dalam salah satu karya hasil penelitiannya tentang Islam di Indonesia (2004),<sup>10</sup> Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Burhan Muhammad, pada forum diskusi ulama Pakistan dan Indonesia di Hotel Atlet Senayan Jakarta pada bulan Juni 2012 yang lalu,<sup>11</sup> dan PM Australia, Alexander Downer, di saat diwawancarai oleh Amanda Blair dari Radio 5AA pada bulan Juli 2012 yang lalu,<sup>12</sup>

8 <http://www.news.detik.com>, artikel “SBY: Indonesia Pertahankan Islam Moderat (13 Nopember 2011)” (akses tanggal 19 April 2013).

9 Budhy Munawar Rachman dan Moh. Shofan, *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, cetakan I (Jakarta: Grasindo, 2010), halaman 16-17; <http://www.nasional.sindonews.com>, artikel “NU dan Muhammadiyah Diharpkan Melindungi Kaum Minoritas (19 Desember 2012)” (akses tanggal 19 April 2013).

10 Giora Eliraz, *Islam in Indonesia: Modernism, Radicalism, and the Middle East Dimension*, cetakan I (Brighton dan Oregon: Sussex Academic Press, 2004), halaman 86.

11 <http://www.republika.co.id>, artikel “Pakistan: Indonesia Terapkan Islam Moderat (26 Juni 2012)” (akses tanggal 19 April 2013).

12 <http://www.antaraneews.com>, artikel “Aus-

dalam bingkai semangat pemersatuan dan internalisasi budaya damai, bukan dalam bingkai pemilahan dan diskriminasi.

Namun, penyebutan Indonesia sebagai negerinya Muslim moderat sebenarnya bukannya tanpa suara keberatan. Kelompok HTI, misalnya, melalui situs resminya menyalahkan pernyataan Presiden SBY—pada acara APEC CEO Summit 2011 di atas—bahwa Indonesia akan menjadi model Islam moderat. Menurut mereka, pernyataan SBY tersebut bertentangan dengan semangat ajaran Islam serta hanya melayani kepentingan dunia Barat semata.<sup>13</sup> Keberatan kelompok HTI tersebut bisa dimengerti jika dilihat dari tren pemikiran ke-Islaman yang mereka anut, di satu sisi, serta dari semangat anti-Barat yang mereka pegang teguh, di sisi yang lain. Kenyataan bahwa term “Muslim moderat”—termasuk term kebalikannya semisal “Muslim radikal” dan “Muslim fundamentalis”—adalah hasil tipologisasi dari dunia Barat menjadi salah satu pendorong tersendiri bagi pandangan kelompok HTI tadi. Atas dasar itulah, sejumlah pakar ICMI Sulawesi Selatan, melalui forum diskusi yang digelar pada bulan September 2008 yang lalu, menyerukan agar “Muslim moderat” digunakan secara lebih berhati-hati. Menurut mereka, term tersebut merupakan produk pemikiran dunia Barat, sehingga ragam kriteria pembeda antara Muslim moderat dan Muslim tidak moderat cenderung bias Barat. Selain itu, tegas mereka, term tersebut memunculkan pengkotak-kotakan

umat Islam yang berdampak buruk bagi integrasi kehidupan sosial-politik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Itulah sebabnya, walaupun terpaksa digunakan, term tersebut menurut mereka harus diposisikan dalam bingkai semangat pemersatuan dan internalisasi budaya damai, bukan dalam bingkai pemilahan dan diskriminasi.<sup>14</sup>

## NU DAN MUHAMMADIYAH: MUSLIM MODERAT?

Sementara itu, penyebutan NU dan Muhammadiyah sebagai representasi Muslim moderat juga sama sekali tidak lepas dari perdebatan. Ahmad Najib Burhani (2008)—peneliti dari LIPI, misalnya, berpandangan bahwa pengambilan posisi moderat seperti yang ditunjukkan oleh NU dan Muhammadiyah saat ini merupakan paradoks dan tindakan pengkhianatan terhadap misi pendirian mereka sendiri, dalam arti telah menghilangkan peran mereka sebagai gerakan visioner seperti yang pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Baginya, posisi moderat sama artinya dengan “posisi netral” yang pasif atau bahkan “posisi cari selamat” yang bersifat oportunistik serta sarat dengan nuansa politik. Pada akhirnya dia pun sepatutnya dengan pernyataan Abu Bakar Ba’asyir bahwa Islam moderat bisa dimaknai sebagai “Muslim *banci*”.<sup>15</sup>

Pernyataan alumnus MAPK Jember ini tentu bisa diperdebatkan. Menyebut posisi moderat sebagai pilihan pasif tentu terhitung simplifikatif. Apalagi jika dikaitkan dengan kompleksitas dan carut-marut kondisi sosial-politik di Indonesia dewasa ini,

tralia Puji NU-Muhammadiyah” (akses tanggal 19 April 2013).

13 <http://www.hizbut-tahrir.or.id>, artikel “Berhentilah Mempromosikan Islam Moderat untuk Melayani Kepentingan Dunia Barat!” (15 Nopember 2011)” (akses tanggal 19 April 2013).

14 <http://www.wahdah.or.id>, artikel “Islam Moderat hanya Memunculkan Pengkotak-kotakan (24 September 2008)” (akses tanggal 19 April 2013).

15 Ahmad Najib Burhani, “Islam Moderat adalah Sebuah Paradoks”, *Jurnal Ma’arif*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2008, halaman 28.

“Ia merepresentasikan sebuah perjalanan eksistensial yang panjang dan berliku sebagai *continuum* dari modus keberagamaan “menjadi” yang telah dirintis oleh Walisongo sejak masa awal Islam di Indonesia.”

- Masdar Hilmy

maka—meminjam ungkapan Masdar Hilmy (2012)—pengasan posisi moderat yang diambil oleh NU dan Muhammadiyah justru merupakan salah satu titik tolak yang sangat penting bagi masa depan kehidupan sosial-politik Indonesia. Modus keberagamaan yang ramah, toleran, dan moderat ala NU dan Muhammadiyah sebenarnya tidak muncul dalam proses yang mudah dan sekali jadi. Ia merepresentasikan sebuah perjalanan eksistensial yang panjang dan berliku sebagai *continuum* dari modus keberagamaan “menjadi” yang telah dirintis oleh Walisongo sejak masa awal Islam di Indonesia.<sup>16</sup>

Namun, di tengah-tengah ekspektasi yang begitu besar terhadap NU dan Muhammadiyah tersebut, muncul kekhawatiran bahwa moderatisme keberagamaan sebenarnya hanya dimiliki oleh kalangan elit kedua orman saja, sementara para pengikutnya pada level *grassroots* masih cukup rentan terhadap infiltrasi radikalisme keberagamaan. Kekhawatiran tersebut berpijak kepada hasil survey yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008 terhadap 500 responden dari kalangan guru dan siswa sejumlah lembaga pendidikan NU dan Muhammadiyah di sejumlah kota besar di Jawa. Hasil survey itu menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih berpandangan eksklusif, sektarian, dan intoleran terhadap komunitas agama lain.<sup>17</sup> Terlepas dari akurasi dan derajat keterwakilan populasi (*representativeness*)-nya, hasil survey tersebut sekurang-kurangnya memperkuat kenyataan bahwa penyebutan NU dan Muhammadiyah sebagai wakil Muslim moderat memang masih menyisakan perdebatan. Adian Husaini (2012), misalnya, dosen Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang terhitung produktif dalam menyuarakan gagasan antiliberalisme dan antipluralisme di Indonesia, menyatakan bahwa hasil survey tersebut sekurang-kurangnya menggambarkan dua hal penting, yaitu: (1) lemahnya pijakan sosiologis penyebutan NU dan Muhammadiyah sebagai model Muslim moderat di Indonesia, dan (2) maraknya ragam gerakan meliberalkan guru agama oleh sejumlah intitusi yang mengusung gagasan-gagasan hegemonik dunia Barat.<sup>18</sup>

16 Masdar Hilmy, “Menjadi Islam Indonesia (24 Nopember 2012)”, <http://www.nasional.kompas.com> (akses tanggal 19 April 2013).

17 Nurrohman, “NU, Muhammadiyah Have Failed to Promote Pluralism at Grassroots (9 Desember 2008)”, <http://www.thejakartapost.com> (akses tanggal 19 April 2013).

18 Adian Husaini, “Upaya Meliberalkan Guru Agama (5 Desember 2013)”, <http://www.insistnet.com> (akses tanggal 19 April 2013).

## PENEGASAN KONTEKS DAN PEMAKNAAN

Perbincangan polemis pada dua sub di atas menggambarkan tinggi dan ketatnya pluralitas pemaknaan terhadap term “Muslim moderat”. Bermunculan sejumlah pandangan yang begitu beragam, baik yang mendukung ataupun yang membantah, tentang apa sebenarnya Muslim moderat itu, apa saja kriterianya, dan apa pula kaitannya dengan term “*ummatan wasathan*” pada Q.S. al-Baqarah (1):143 atau dengan diskursus demokrasi dan HAM. Belum lagi jika ditambah dengan persoalan identifikasi orang atau kelompok yang representatif sebagai Muslim moderat, maka perdebatan pun semakin meruncing serta tidak menemukan titik akhir sebagaimana telah diuraikan pada dua sub sebelumnya.

Atas dasar itulah, maka penegasan konteks Islam dan wacana politik global pascatragedi 11 September 2001 sebagaimana yang dilakukan oleh John L. Esposito di atas<sup>19</sup> menjadi titik tolak yang cukup penting. Pemaknaan term “Muslim moderat” yang dia tawarkan pun sebenarnya relevan dengan konteks kehidupan sosial-politik, terutama ketika dikaitkan dengan isu-isu seputar radikalisme agama, yang berkembang di Indonesia dewasa ini. Seperti dikatakan oleh Dewi Fortuna Anwar (2008), seorang peneliti dari LIPI, upaya Indonesia mengenalkan wajah barunya yang moderat bisa sia-sia jika pemberitaan dunia Internasional selalu didominasi oleh ragam aktivitas kelompok Muslim radikal.<sup>20</sup> Dalam konteks ini, keberadaan NU

dan Muhammadiyah yang diposisikan sebagai representasi Muslim moderat di Indonesia, terlepas dari kelemahan dan perdebatan yang mengitarinya, tidak saja paralel dengan pemaknaan Esposito tersebut, melainkan juga relatif “menjanjikan” sebuah optimisme terkait dengan upaya menampilkan wajah moderat Islam di mata dunia Internasional. Sebagai dua ormas Islam dengan jumlah pengikut terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah sudah tentu memiliki kekuatan sosial-politik untuk bisa disebut sebagai *mainstream* dan representasi dari umat Islam Indonesia secara keseluruhan.

Penegasan seperti ini tentu tidak lepas dari bias-bias tertentu, karena agak menafikan ragam suara keberatan yang berkembang. Namun, mengakui keberadaan NU dan Muhammadiyah sebagai representasi Muslim moderat di Indonesia pada akhirnya tidak bisa dihindari lagi. Mengapa, sebab selain telah mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional, fenomena radikalisme keagamaan sudah terlanjur menjadi isu-isu aktual yang menggelisahkan banyak kalangan yang sangat konsen terhadap wacana integrasi bangsa di era Reformasi. Selain itu, hingga saat ini, sulit dijumpai ormas lain yang lebih representatif daripada atau minimal sebanding dengan kedua ormas tersebut.<sup>21</sup> Terlepas dari kelemahan dan kekurangannya, kedua NU dan Muhammadiyah terbukti telah melakukan banyak hal yang penting dan strategis terkait dengan intensifikasi perdamaian dunia dan kampanye antikekerasan dan terorisme, baik dalam skala lokal, nasional, maupun

<sup>19</sup> Lihat halaman 2-3 dari tulisan ini.

<sup>20</sup> Dikutip oleh: Rizal Sukma, “Domestic Politics and International Posture: Constraints and Possibilities”, dalam Anthony J.S. Reid (ed.), *Indonesia Rising: the Respositioning of Asia's Third Giant*, cetakan I (Singapura: ISEAS Publishing, 2012), halaman 87.

<sup>21</sup> Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, terjemahan oleh Tufel Najib Musyaddad, cetakan I (Jakarta: Pustaka Alvabet dan Yayasan INSEP, 2006), halaman 266.

internasional. Kedua ormas Islam tersebut bahkan baru saja diberitakan akan menandatangani nota kesepahaman dengan Vatikan pada akhir tahun 2013 ini. Tujuannya adalah, seperti ditegaskan oleh Din Syamsuddin, untuk mengintensifkan dialog antaragama, khususnya Islam dan Katolik, serta melakukan aksi kemanusiaan secara bersama.<sup>22</sup> Rencana besar dan strategis tersebut tentu semakin menguatkan keberadaan NU dan Muhammadiyah sebagai representasi dari Muslim moderat di Indonesia, yakni komunitas Muslim yang—seperti ditegaskan oleh Esposito di atas—hidup dan beraktivitas untuk dan di tengah-tengah masyarakatnya, mengupayakan perubahan dari bawah (*from below*), dan menolak ekstrimisme keberagamaan, kekerasan, dan terorisme.<sup>23</sup>

#### **FENOMENA RADIKALISME: TANTANGAN MUSLIM MODERAT**

Dengan penegasan konteks Islam dan wacana politik global pascatragedi 11 September 2001, maka term “Muslim moderat” juga menjadi pijakan awal (*starting point*) yang penting ketika dikaitkan dengan fenomena gerakan Islam radikal di Indonesia akhir-akhir ini. Pascatumbangnya rezim Soeharto (1998), berbagai simbol dan identitas keagamaan serta gelombang radikalisme cenderung menguat dan menghiasi ruang-ruang publik (*public spheres*) dan konteks sosial-politik. Bermunculan berbagai kelompok militan Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Laskar Mujahidin, dan sebagainya, yang turun ke jalan-jalan seraya meneriakkan tuntutan pemben-

tukan negara Islam (*khilāfah*), pemberlakuan syariat Islam, dan bahkan pengobaran gerakan kekerasan yang berporos kepada semangat anti-Barat, anti-demokrasi, dan juga anti-kalangan non-Muslim.

Fenomena ini, oleh sejumlah kalangan, dianggap sebagai situasi yang “berbahaya” serta menjadi “ancaman serius” bagi kehidupan bangsa Indonesia di bawah NKRI yang begitu plural namun harmonis selama berabad-abad. Al Makin (2011), misalnya, dalam salah satu artikelnya pada salah satu surat kabar terkemuka di Jakarta, menggambarkan adanya “perang” kontestasi wacana publik antara Muslim moderat yang mayoritas, di satu pihak, dan kalangan Muslim radikal yang minoritas, di pihak yang lain. Ironi yang diungkapkan oleh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini adalah bahwa meskipun merupakan minoritas, kalangan Muslim radikal terbukti lebih mampu menguasai wacana publik di dalam menyuarakan gagasan-gagasan militan dan menunjukkan ragam simbol dan identitas keagamaan mereka. Sementara, di pihak lain, Muslim moderat yang sebenarnya merupakan kalangan mayoritas, cenderung “diam” (*silent*), enggan menyuarakan pandangan moderat, serta terkesan “membiarkan” suara dan aktivitas Muslim radikal. Meskipun kadangkala menyuarakan penolakan, namun suara mereka seringkali terlalu sumbang. Itulah sebabnya, Al Makin secara pesimistik menganggap bahwa Muslim moderat dewasa ini sepertinya mulai “punah” (*extinct*).<sup>24</sup>

Sementara itu, Noorhaidi Hasan (2011 dan 2013), kolega Al Makin di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

22 <http://www.republika.co.id>, artikel “Muhammadiyah-NU Siap Bikin MoU dengan Vatikan, Soal Apa? (26 Maret 2013)” (akses tanggal 19 April 2013).

23 Lihat halaman 3 dari tulisan ini.

24 Al Makin, “Increased Radicalism: The Failure of Moderate Islam”, *The Jakarta Post*, 16 Mei 2011.

# Keberadaan dua ormas tipikal Muslim moderat tersebut menjadi sebuah “garansi” optimisme prospek demokrasi dan pluralisme di Indonesia.

memiliki pandangan yang lebih optimistik. Artinya, Muslim radikal di satu sisi tetap merupakan “ancaman serius” tidak hanya bagi kohesi sosial-politik masyarakat Indonesia saja. Wacana eksklusivitas dan aksi-aksi kekerasan yang mereka tebarkan bisa mengancam integritas nasional.<sup>25</sup> Namun, di sisi yang lain, peraih gelar doktor dari Utrecht University (2005) ini tetap bersikap optimistik bahwa upaya apapun yang mereka lakukan untuk mengontrol dan meruntuhkan ruang publik yang demokratis hampir pasti akan berujung kepada kegagalan. Konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan akan berkontribusi terhadap melemahnya pengaruh mereka. Kekuatan demokratis tidak akan dapat dibatasi, sehingga Indonesia akan semakin kuat sebagai sebuah negara demokrasi yang multikultural seperti yang telah ditunjukkan oleh Muslim moderat selama berabad-abad.<sup>26</sup>

Senada dengan Noorhaidi Hasan, Samsu Rizal Panggabean (2011) menyatakan bahwa, terlepas dari kelemahan dan kekurangannya, Islam di era reformasi telah berhasil tampil sebagai—meminjam ungkapan Kishore Mahbubani (2008)—“keajaiban modern demokrasi”. Negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini menunjukkan tidak ada yang tak selaras antara mengamalkan Islam, di satu sisi, dan menjadi demokratis, di sisi yang lain. Predikatnya sebagai

negara yang “bebas” dilihat dari sudut pelaksanaan hak-hak politik dan kebebasan sipil dengan segala kelemahan dan kekurangan di dalamnya membuat negara ini layak untuk disebut sebagai “negara demokrasi yang belajar”.<sup>27</sup> Semua itu, menurut Robert W. Hefner (2005), tidak lepas dari keberadaan NU dan Muhammadiyah sebagai dua pilar penting moderasi dan pluralisme kerakyatan (*civil pluralism*) di Indonesia. Keberadaan dua ormas tipikal Muslim moderat tersebut menjadi sebuah “garansi” optimisme prospek demokrasi dan pluralisme di Indonesia.<sup>28</sup>

## PENUTUP

Dari seluruh uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa ketika dibawa pada konteks konstelasi sosial-politik dewasa ini, makna dari term “Muslim moderat” sebetulnya bisa ditemukenali dengan mudah. Term tersebut merujuk kepada Muslim mayoritas yang hidup dan beraktivitas untuk dan di tengah-tengah masyarakatnya, mengupayakan perubahan dari bawah (*from below*), dan menolak ekstrimisme keberagamaan, kekerasan, dan terorisme. Keberadaan ormas Islam berhaluan moderat seperti NU dan Muhammadiyah menjadi sebuah jaminan bagi optimisme tegaknya demokrasi di Indonesia di tengah “badai” kelompok Islam radikal dewasa ini. []

25 Noorhaidi Hasan, “Multikulturalisme dan Tantangan Radikalisme”, dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Melayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*, edisi digital (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011), halaman 198-199.

26 Idem, *The Making of Public Islam: Piety, Democracy, and Youth in Indonesian Politics*, cetakan I (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), halaman 135-244.

27 Samsu Rizal Panggabean, “Negara Demokrasi yang Belajar”, dalam Ihsan Ali-Fauzi dan Samsu Rizal Panggabean (ed.), *Demokrasi dan Kekecewaan*, edisi digital (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011), halaman 29-31.

28 Robert W. Hefner, “Muslim Democrats and Islamist Violence in Post-Soeharto Indonesia”, dalam Robert W. Hefner (ed.), *Remaking Muslim Politics, Pluralism, Contestation, and Democratization* (Princeton dan Oxford: Princeton University Press, 2005), halaman 298.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid, 2011. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Edisi digital. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.
- Adian Husaini. 2013. "Upaya Meliberalkan Guru Agama (5 Desember 2013)", <http://www.insistnet.com> (akses tanggal 19 April 2013).
- Al Makin. 2011. "Increased Radicalism: The Failure of Moderate Islam". *The Jakarta Post*. 16 Mei 2011.
- Budhy Munawar Rachman dan Moh. Shofan. 2010. *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*. Cetakan I. Jakarta: Grasindo.
- Esposito, John L. 2010. *The Future of Islam*. Cetakan I. New York: Oxford University Press.
- \_\_\_\_\_. 2011. *What Everyone Needs to Know about Islam: Answers to Frequently Asked Questions, from One of America's Leading Experts*. Edisi II. Oxford: Oxford University Press, Inc.
- Fuad Fachruddin. 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Terjemahan oleh Tufel Najib Musyaddad. Cetakan I. Jakarta: Pustaka Alvabet dan Yayasan INSEP.
- Giora Eliraz. 2004. *Islam in Indonesia: Modernism, Radicalism, and the Middle East Dimension*. Cetakan I. Brighton dan Oregon: Sussex Academic Press.
- Hefner, Robert W. 2005. "Muslim Democrats and Islamist Violence in Post-Soeharto Indonesia". Dalam Rober W.Hefner (ed.), *Remaking Muslim Politics, Pluralism, Contestation, and Democratization*. Princeton dan Oxford: Princeton University Press.
- [Http://www.antaranews.com](http://www.antaranews.com), artikel "Australia Puji NU-Muhammadiyah" (akses tanggal 19 April 2013).
- [Http://www.bisnis-kti.com](http://www.bisnis-kti.com), artikel "Din Syamsuddin: Ajaran Islam Moderat Indonesia Berpotensi Jadi Role Model (24 Maret 2013)" (akses tanggal 19 April 2013).
- [Http://www.hizbut-tahrir.or.id](http://www.hizbut-tahrir.or.id), artikel "Berhentilah Mempromosikan Islam Moderat untuk Melayani Kepentingan Barat! (15 Nopember 2011)" (akses tanggal 19 April 2013).
- [Http://www.nasional.sindonews.com](http://www.nasional.sindonews.com), artikel "NU dan Muhammadiyah Diharapkan Melindungi Kaum Minoritas (19 Desember 2012)" (akses tanggal 19 April 2013).
- [Http://www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), artikel "SBY: Indonesia Pertahankan Islam Moderat (13 Nopember 2011)" (akses tanggal 19 April 2013).
- [Http://www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), artikel "Kang Said: Islam Moderat Paling Tepat untuk Indonesia (30 Mei 2012)" (akses tanggal 19 April 2013).
- [Http://www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), artikel "Muhammadiyah-NU Siap Bikin MoU dengan Vatikan, Soal Apa? (26 Maret 2013)" (akses tanggal 19 April 2013).
- [Http://www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), artikel "Pakistan: Indonesia Terapkan Islam Moderat (26 Juni 2012)" (akses tanggal 19 April 2013).
- [Http://www.wahdah.or.id](http://www.wahdah.or.id), artikel "Islam Moderat hanya Memunculkan Pengkotak-kotakan (24 September 2008)" (akses tanggal 19 April 2013).

- Masdar Hilmy. 2012. "Menjadi Islam Indonesia (24 Nopember 2012)", <http://www.nasional.kompas.com> (akses tanggal 19 April 2013).
- Najib Burhani, Ahmad. 2008. "Islam Moderat adalah Sebuah Paradoks". *Jurnal Ma'arif*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2008.
- Noorhaidi Hasan. 2011. "Multikulturalisme dan Tantangan Radikalisme". Dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*. Edisi digital. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.
- \_\_\_\_\_. 2013. *The Making of Public Islam: Piety, Democracy, and Youth in Indonesian Politics*. Cetakan I. Yogyakarta: Suka-Press.
- Nurrohman. 2008. "NU, Muhammadiyah Have Failed to Promote Pluralism at Grassroots (9 Desember 2008)", <http://www.thejakartapost.com> (akses tanggal 19 April 2013).
- Rizal Panggabean, Samsu. 2011. "Negara Demokrasi yang Belajar". Dalam Ihsan Ali-Fauzi dan Samsu Rizal Panggabean (ed.), *Demokrasi dan Kekecewaan*. Edisi digital. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.
- Rizal Sukma. 2012. "Domestic Politics and International Posture: Constraints and Possibilities". Dalam Anthony J.S. Reid (ed.), *Indonesia Rising: the Repositioning of Asia's Third Giant*. Cetakan I. Singapura: ISEAS Publishing.
- Zuhairi Misrawi. 2010. *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian*. Cetakan I. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.